

BAB IV

FAKTOR KANADA MEMASUKKAN ASPEK GENDER DALAM BANTUAN *CANADA- INDONESIA TRADE AND PRIVATE SECTOR ASSISTANCE (2014-2019)*

Bab IV akan menjawab pertanyaan penelitian dari tesis ini yang yakni mengenai faktor yang membuat Kanada untuk memasukkan aspek gender pada bantuan pembangunan ke Indonesia melalui *Canada-Indonesia Trade And Private Sectors Assistance* pada tahun 2014 hingga 2019. Selain itu, bab ini akan memberikan data bukti atau fakta dari pernyataan tesis yang dihasilkan dari menggunakan teori dan konsep. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, teori yang digunakan dalam tesis ini adalah proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh Snyder, Bruck, dan Sapin yang menjelaskan internal dan eksternal pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Selain itu, ada konsep rejim internasional untuk membantu jawaban besar dalam faktor eksternal serta kerangka pikiran menggunakan konsep pengarusutamaan gender.

A. Faktor Internal Kanada memasukkan Gender dalam Bantuan *Canada-Indonesia Trade And Private Sectors Assistance 2014-2019*

Faktor internal yang mempengaruhi Kanada untuk memasukkan aspek gender dalam bantuan pembangunan ke Indonesia berasal dari diri Kanada sendiri. Pemerintah Kanada adalah pihak yang berinisiatif untuk menempatkan aspek gender dalam bantuan Kanada, oleh karena itu tesis ini akan mengidentifikasi faktor internal di Kanada. Berdasarkan teori Snyder, Bruck, dan Sapin dengan pengaturan pengambilan keputusan internal terdapat perilaku dan struktur sosial yang juga akan menjadi

faktor internal yang membuat Kanada memutuskan untuk melibatkan aspek gender dalam kebijakan luar negeri mereka. Pengaturan internal pengambilan keputusan sering terkait dengan opini publik dan politik domestik. Selain itu, dalam keputusan penetapan internasional, ada perilaku atau struktur sosial yang akan mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan mereka. Oleh karena itu, penulis membuat hipotesis bahwa faktor internal Kanada memutuskan untuk memasukkan aspek gender pada bantuan pembangunan ke Indonesia dalam bantuan *Canada-Indonesia Trade And Private Sektore Assistance* pada tahun 2014 hingga 2019 sebagai berikut:

1. Internal setting of decision-making

Dalam setting internal ini suatu negara mempertimbangkan aspek masyarakat dengan melihat tuntutan, kebudayaan atau kebiasaan, dan perilaku di masyarakat terhadap suatu masalah yang terjadi di suatu negara sehingga pembuat kebijakan dapat memproses suatu kebijakan baru yang tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Setting internal berhubungan dengan politik domestik, opini publik dan posisi geografis. Politik domestik, *non-human environment* (lingkungan bukan manusia), *crosscultural* (lintas budaya) dan *social relationships* (hubungan sosial) saling berhubungan yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan. Organisasi sosial dapat lebih mengundang perhatian lebih ketimbang partai politik ataupun kekuatan nasional.

Dalam struktur dan perilaku sosial, dalam faktor ini negara memposisikan diri sebagai aktor yang mampu memberikan pengaruh

dalam kebijakan yang dibuat, para pembuat kebijakan yang mengatasnamakan negara harus memiliki satu orientasi nilai yang sama dalam merumuskan suatu kebijakan (*Major Common Value Orientations*). Memiliki pola kelembagaan yang utama (*Major Institutional Patterns*), memiliki karakteristik dalam organisasi sosial (*Major Characteristics of Social Organizations*), memiliki perbedaan peran dan spesifikasi tertentu dalam membuat suatu kebijakan (*Role Differentiation and Specialization*), memiliki fungsi dan jenis keterlibatan kelompok (*Groups:Kinds and Functions*), memiliki proses sosial yang relevan dengan memiliki formasi bentuk pendapat sendiri dan politik (*Relevant Social Processes;Opinion Formation and Political*). Struktur dan perilaku sosial ini saling mempengaruhi dengan setting internal pada bagian kebudayaan atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Menurut Snyder dampak dari kekuatan domestik sangat besar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri karena faktor dan kondisi dari masyarakat pastilah sangat dipertimbangkan oleh pembuat keputusan.

a. Non-human environment

Faktor internal pertama yang mempengaruhi keputusan Kanada dalam memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia melalui *Canada-Indonesia Trade And Private Sektore Assistancen* adalah dari aspek *non-human environment*. *Non-human environment* yang dimaksud yakni adanya sebuah konstitusi yang merupakan tujuan dari Kanada. Diantara undang-

undang konstitusi tersebut yaitu *The Canadian Human Rights Act of 1977 (Women Right)* dan *The Canadian Human Rights Act of 1977 (Women Right)*.

Sejarah Kanada telah dibentuk oleh banyak wanita yang bekerja keras untuk mempromosikan dan menegakkan kesetaraan gender di Kanada. Wanita memperjuangkan sejumlah hak asasi manusia penting yang telah menjadi nilai-nilai inti Kanada - hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi dan federal, hak untuk memiliki properti, hak untuk mendapatkan upah yang adil, dan akhirnya, hak untuk diakui sebagai "orang " dibawah hukum. Perempuan sekarang dilindungi dari diskriminasi dengan alasan gender, usia, status perkawinan dan banyak lagi oleh *Canadian Human Rights Act* dan *Canadian Charter of Rights and Freedoms*.(Canada, 2017)

Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia.Hak-hak kesetaraan sangat penting, mengingat perlakuan yang tidak setara yang dialami perempuan di Kanada.Sejumlah instrumen hukum ada di Kanada untuk melindungi kesetaraan bagi perempuan.

Salah satunya adalah *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, yang memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak asasi individu.Ini berlaku untuk hubungan antara individu dan pemerintah, sementara hubungan antara individu dicakup dalam bidang-bidang tertentu oleh

Canadian Human Rights Act (CHRA), serta undang-undang hak asasi manusia provinsi dan teritorial. Ada dua bagian utama dari Piagam yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kesetaraan: bagian 15 dan 28. (Canada, 2017)

Bagian 15 memastikan perlindungan dan manfaat hukum yang sama "*tanpa diskriminasi [...] berdasarkan ras, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia atau cacat mental atau fisik.*"

Keputusan pengadilan telah memperluas daftar ini untuk melarang diskriminasi dengan alasan lain, seperti kewarganegaraan, status perkawinan dan orientasi seksual; keputusan juga telah mengakui bahwa banyak alasan diskriminasi dapat bersinggungan dalam kasus-kasus tertentu.

Bagian 28 menjamin bahwa semua hak yang dicakup dalam Piagam berlaku sama untuk pria dan wanita.

The Canadian Human Rights Act of 1977 menyatakan bahwa semua warga Kanada memiliki hak atas kesetaraan, kesempatan yang sama, perlakuan yang adil, dan lingkungan yang bebas dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, status perkawinan dan status keluarga. Ini melindungi warga Kanada dari diskriminasi ketika mereka dipekerjakan oleh atau menerima layanan dari: (1) Pemerintah federal; (2) Pemerintah

negara-negara pertama; atau (3) Perusahaan swasta yang diatur oleh pemerintah federal seperti bank, perusahaan angkutan truk, perusahaan penyiaran dan perusahaan telekomunikasi.

CHRA membentuk *Canadian Human Rights Commission* untuk menyelidiki dan menyelesaikan pengaduan diskriminasi, dan merujuknya ke *Canadian Human Rights Tribunal* untuk suatu keputusan atau penyelesaian. Undang-undang legislatif lainnya yang penting bagi perempuan dan hak kesetaraan adalah *Employment Equity Act and the Public Sector Equitable Compensation Act*. (Canada, 2017)

Dengan adanya undang-undang konstitusi diatas mendorong setiap kebijakan Kanada baik untuk dalam maupun luar negeri harus melindungi hak-hak perempuan dan mendorong adanya kesetaraan gender. Sebuah undang-undang konstitusi sebuah Negara merupakan prinsip-prinsip dasar dan hukum suatu negara yang menentukan kekuasaan dan tugas pemerintah akan menjamin hak-hak tertentu untuk orang-orang di dalamnya.

b. Society

Feminisme dapat diartikan sebagai gerakan politik yang minat utamanya adalah hak-hak perempuan dan emansipasi gender. Feminisme adalah pendekatan akademis yang melihat melalui lensa gender untuk memahami lebih jauh tidak hanya tentang perempuan dan gender tetapi

juga bagaimana perempuan dan gender mampu menolong Kanada untuk mempelajari lebih luas tentang dunia secara umum.

Feminisme dalam bahasa sederhana adalah “tidak hanya menyangkut persoalan perempuan ataupun sekadar menambahkan perempuan kedalam konstruksi laki-laki (male construction), melainkan menyangkut pandangan terhadap politik global dalam melihat isu gender dan perempuan dan bagaimana hal ini menunjukkan bagaimana dunia mengupayakannya “. (Narain, 2014) Didalam feminisme, ada banyak aliran pemikiran yang berkembang dan mempunyai jawaban yang berbeda mengenai politik dan politik internasional; namun, perbedaan tersebut harus dilihat sebagai satu lautan dengan banyak gelombang dan bukan sebagai sungai-sungai yang mengalir ke banyak arah. (Soetjipto & dkk, Gender dan Hubungan Internasional Sebuah Pengantar, 2013)

Dalam pengambilan keputusan mengenai bantuan pembangunan berbasis kesetaraan gender oleh Kanada dipengaruhi oleh keadaan social yang dipengaruhi oleh pemikiran feminisme sehingga munculah feminist politicians dan femocrat. Pemikiran dan nilai-nilai yang dimiliki mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat.

Nilai-nilai itu termasuk feminisme dan pemajuan hak-hak perempuan dan anak perempuan. Penting - dan bersejarah -

bahwa Kanada memiliki perdana menteri dan pemerintah yang bangga menyatakan diri sebagai feminis. Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini merupakan inti dari kebijakan luar negeri Kanada.

Minister of International Development and La Francophonie meluncurkan Feminist International Assistance Policy pertama Kanada, yang menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Kanada memposisikan Kanada di garis depan upaya global ini. Ini adalah masalah keadilan dasar dan juga ekonomi dasar. Kanada tahu bahwa memberdayakan perempuan, di luar negeri dan di Kanada, membuat keluarga dan negara lebih sejahtera.

Kanada berkomitmen untuk semua ini karena solidaritas internasional adalah nilai Kanada bersama. Di dunia yang semakin saling terhubung maka dari itu bantuan internasional Kanada tidak hanya akan menguntungkan komunitas mitra tetapi juga warga Kanada. Bersama dengan mitra dan sekutu internasional Kanada, Kanada memiliki tanggung jawab kolektif untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan dan keamanan global, pendidikan, perlindungan lingkungan dan pertumbuhan yang bekerja untuk semua orang — dan Kanada akan melakukannya dengan keyakinan dan kebanggaan.

Pada tahun 1970-an dan sesudahnya, sejumlah kelompok yang berdedikasi pada

alasan memilih lebih banyak perempuan untuk jabatan publik tiba di tempat kejadian di Kanada: Women for Political Action, Feminist Party of Canada, Winning Women, Solusi 52%, Komite untuk 94, dan Equal Voice. Kebangkitan tentang memperjuangkan hak perempuan bangkit dari aktivisme gerakan perempuan di sekitar perwakilan perempuan di tingkat nasional di Kanada. Pada United Nations World Conference on Women tahun 1995 tentang Perempuan, Kanada berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan kesetaraan akses perempuan dan penuh partisipasi dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Kanada berbagi beberapa karakteristik politik dengan AS, seperti sistem pemilihan FPTP. Kanada mengandalkan pekerjaan banyak kelompok perempuan mengkhhususkan diri dalam promosi perempuan dalam politik, tetapi belum pernah ada kampanye nasional atau tuntutan kuota gender yang sah atau kursi yang dipesan. Memang, tidak semua pihak memandang representasi perempuan sebagai masalah kepedulian demokratis.

Peran politisi perempuan dan pengaruh feminisme di Kanada memberikan hasil yang baik bagi kemajuan partisipasi perempuan di Kanada, dengan adanya perwakilan perempuan di Parlemen aspirasi perempuan tersampaikan.

Wanita pertama yang terpilih ke House of Commons of Canada adalah Agnes Macphail, dalam pemilihan 1921. Meskipun perwakilan perempuan dalam politik telah meningkat sejak itu, dan partai-partai politik telah mengidentifikasi peningkatan jumlah kandidat perempuan sebagai tujuan organisasi dan politik, perempuan masih secara signifikan kurang terwakili dalam politik dibandingkan dengan populasi umum. Kanada memiliki seorang wanita Perdana Menteri, Kim Campbell. (CBC, 2018)

Partai-partai politik kadang-kadang mencapai perwakilan seimbang dalam kaukus terpilih mereka, tetapi terutama sebagai produk sampingan dari keruntuhan partai - misalnya, dalam pemilu 1993, Konservatif Progresif mencapai kesetaraan gender dalam kaukus terpilih mereka, tetapi hanya berdasarkan pemilihan dua anggota saja. Parlemen nasional dan kehilangan status partai resmi. Pada berbagai kesempatan, partai-partai juga memiliki 100 persen perwakilan perempuan di kaukus mereka, tetapi sekali lagi hanya karena memiliki kaukus yang hanya terdiri dari satu atau dua anggota. Partai Demokrasi Baru Yukon memperoleh perbedaan, dalam pemilihan umum Yukon 2011, untuk menjadi partai pertama dengan status partai resmi yang pernah memiliki kaukus terpilih yang mencapai atau melampaui paritas antara perempuan dan laki-laki, dengan empat perempuan dan dua laki-laki terpilih sebagai MLA. Partai Demokrasi Baru Alberta mencapai

perbedaan, dalam pemilihan umum Alberta 2015, dari yang paling dekat bahwa kaukus partai yang memerintah pernah mencapai keseimbangan gender - kaukus partai memiliki 25 wanita dan 28 pria, mewakili kaukus yang 47 persen perempuan. (Bennett, 2015)

Pemerintah konsensus non-partisan Wilayah Barat Laut mencapai hampir paritas gender di seluruh badan legislatif dalam pemilihan umum Wilayah 2019, dengan sembilan perempuan dan 10 laki-laki terpilih sebagai MLA (Member of Legislative Assembly); pada pertemuan formal pertama dewan legislatif, MLA memilih seorang wanita, Caroline Cochrane, sebagai perdana menteri, dan memilih wanita untuk empat dari enam peran kabinet. (Williams, 2019)

Pada 2010, Kanada menduduki peringkat ke-50 di dunia untuk partisipasi perempuan dalam politik, dengan perempuan hanya memegang 23 persen kursi di badan legislatif federal, provinsi, dan teritorial. Di tingkat federal, Kanada diikat dengan Mauritania untuk tempat ke-49. Perdana Menteri Justin Trudeau menunjuk kabinet barunya didasarkan pada kesetaraan gender, sama seperti ketika ia membentuk pemerintahannya pada tahun 2015. Perempuan berada dalam minoritas di House of Commons dan semua kamar legislatif provinsi dan teritorial. Untuk mengimbangi ini, pengangkatan anggota terdiri dari wanita sebanyak pria telah menyebar. Meski bukan

fenomena baru di Kanada, paritas ini masih merupakan fenomena yang pertama kali.

Jean Charest pada 2007 yang pada saat itu menjabat sebagai perdana menteri Quebec, ia menunjuk kabinet pertama negara itu dengan paritas gender. Rachel Notley, perdana menteri terpilih Alberta pada 2015, melakukan hal yang sama ketika dia berkuasa, seperti halnya John Horgan di British Columbia pada 2017 dan François Legault di Quebec satu tahun kemudian. Di kancah federal, penunjukan kabinet pertama yang terdiri dari jumlah perempuan dan laki-laki yang sama oleh Trudeau pada tahun 2015 telah menerima banyak perhatian. Kanada dibawah pemerintahan Justin Trudeau berusaha untuk lebih memahami berbagai pandangan yang diungkapkan di media ketika kabinet dengan kesetaraan gender diumumkan. Liputan media umumnya baik, tetapi juga menunjukkan sejumlah kekhawatiran tentang langkah-langkah untuk mendukung akses yang lebih baik bagi perempuan di bidang politik. (Rouillard & Lalancette, 2019)

Fenomena yang terjadi ini membuat tentang bahasan komposisi paritas kabinet menyoroti aspek historis dari pengumuman atau menyajikannya sebagai cerminan masyarakat dan era di mana inklusi dan kesetaraan adalah nilai-nilai penting. Harapan melihat standar baru yang ditetapkan setelah pengumuman Charest pada 2007 tentang kabinet yang seimbang gender juga sangat hadir: Paritas gender

adalah suatu prestasi, yang pertama di Amerika Utara, yang akan memberi tekanan pada pemerintah Kanada lainnya, pemerintah federal di khususnya.

Strategi persuasif yang berbeda digunakan untuk menyajikan kesetaraan gender dan langkah-langkah implementasinya sebagai bermanfaat bagi masyarakat: penggunaan statistik pada jumlah perempuan yang dipilih, contoh-contoh strategi yang diterapkan di panggung dunia, atau dampak dari sejumlah besar perempuan pada pengambilan keputusan.

Pada November 4, 2015, Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada yang baru terpilih, menunjuk 15 wanita untuk duduk di kabinet 30. 'Kabinet paritas' baru Trudeau adalah sebuah revolusi di Kanada karena mengakhiri kebiasaan lama penamaan laki-laki untuk sebagian besar posisi pemerintah bahwa negara itu berbagi dengan berbahasa Inggris lainnya seperti Amerika Serikat dan Inggris. Tidak seperti negara-negara Eropa seperti Prancis dan Italia, Kanada memiliki reputasi negatif dalam hal keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Faktanya, Kanada berada di peringkat ke-50 dari 190 negara di peringkat negara-negara Interparlemen 2014 terkait dengan partisipasi politik perempuan. Selama kampanyenya, Trudeau menampilkan dirinya sebagai juara kesetaraan gender ketika ia berjanji pada kabinet 50-50. Dia bahkan menyatakan sebelum pemilihannya bahwa dirinya adalah seorang feminis dan bangga menjadi

salah satunya. (Kassenaar & Wingrove, 2015)

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau merupakan seorang feminis. Trudeau mengatakan ayahnya, mantan Perdana Menteri Pierre Trudeau, mengajarnya pentingnya membela hak-hak orang lain. Tetapi dia memuji ibu dan istrinya dengan membentuknya menjadi seorang feminis seperti sekarang ini. Baginya, karena seorang feminis adalah seseorang yang percaya bahwa pria dan wanita harus setara, dan yang percaya bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk sampai ke sana. Maka dari itu untuk mencapai apa yang dia percayai mengenai adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menajadikan setiap kebijakan dibawah pemerintahannya berbasis kesetaraan gender. (Carpenter, 2018)

Trudeau memposisikan dirinya sebagai kebalikan dari mantan perdana menteri Konservatif Stephen Harper, yang pemerintahannya hampir sepuluh tahun termasuk menghapus kata "kesetaraan" dari mandat Status of Women Canada (WAGE) dan memangkas anggarannya sebesar 37 persen. Pada 2015, Kanada telah turun ke peringkat 25 pada indeks ketidaksetaraan Gender PBB, turun dari posisi pertama pada 1995. Masuklah ke Trudeau, yang feminismenya begitu terbuka sehingga menarik perhatian baik pro dan kontra di masyarakat. Kanada telah naik kembali ke peringkat ke-12 berdasarkan indeks PBB, yang mengevaluasi negara berdasarkan

indikator seperti kesehatan reproduksi, tingkat pendidikan dan jumlah perempuan dalam pemerintahan. (Gerster, 2019)

Perdana Menteri Trudeau, seorang feminis yang memproklamirkan diri, telah memodelkan perwakilan dengan menunjuk seorang menteri luar negeri perempuan, seorang menteri pembangunan perempuan dan kabinet paling beragam dalam sejarah Kanada. Kebijakan Kanada tidak, bagaimanapun, berjanji untuk "menggangu" struktur kekuasaan patriarki dalam bantuannya, seperti yang dilakukan Swedia, meskipun itu memasukkan partisipasi politik perempuan sebagai bidang prioritas tematis. Untuk sebagian besar, pendekatan Kanada memprioritaskan kesetaraan gender sebagai prioritas utama dalam melayani tujuan ekonomi dan keamanan yang lebih luas. Menurut Pemerintah Kanada, kebijakan mereka “berupaya memberantas kemiskinan dan membangun dunia yang lebih damai, lebih inklusif, dan lebih sejahtera. Kanada sangat percaya bahwa mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan adalah pendekatan yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini ”

Menteri Luar Negeri Kanada saat ini yakni Chrystia Freeland merupakan salah satu menteri perempuan di Kanada. Sebelumnya setelah pemilihan 2015, Chrystia Freeland diangkat ke Kabinet sebagai Menteri Perdagangan Internasional. Sekitar waktu yang sama, ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 orang

paling berpengaruh di Toronto oleh Toronto Life. Freeland, mantan jurnalis multibahasa yang bintangnya telah meningkat di Partai Liberal sejak pemilihannya sebagai anggota parlemen pada tahun 2013, sekarang adalah wanita ketiga yang memegang jabatan tersebut - dan Liberal wanita pertama yang melakukannya. Menurut Chrystia Freeland, wanita adalah agen kuat untuk perubahan dan perdamaian sehingga dengan adanya pemberdayaan perempuan akan meningkatkan perekonomian Negara. Freeland dan Trudeau adalah ekstrovert dan politisi alamiah yang memiliki pandangan serupa terhadap peran perempuan dalam pembangunan negara. (Diebel, 2015)

Chrystia Freeland merupakan seorang feminis. Pengalaman dimilikinya memberikan efek yang sangat besar pada dirinya. Dari ibunya, Halyna, seorang feminis dan aktivis yang menggunakan hukum untuk memperjuangkan keadilan sosial, Freeland belajar betapa kuatnya perempuan. Hal tersebutlah yang menjadikannya seorang feminis. Freeland meneruskan perjuangan ibunya, Halyna. Dia sering mengutip ikon feminis Emma Goldman ke Chrystia, dan baris favoritnya adalah: *"If I can't dance, I don't want to be part of your revolution."* (Diebel, 2015)

Kanada berkomitmen untuk memberikan bantuan internasional feminis yaitu: (1) Berbasis hak asasi manusia dan inklusif. Semua orang harus menikmati hak asasi

manusia yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, orientasi seksual, identitas gender, usia, kemampuan atau aspek identitas lainnya; (2) Strategis dan fokus. Bantuan akan diarahkan pada inisiatif-inisiatif yang paling mendukung pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan memiliki potensi terbesar untuk mengurangi ketidaksetaraan gender; (3) Transformatif dan aktivis. Hubungan kekuasaan yang tidak merata dan diskriminasi sistemik, serta norma-norma dan praktik-praktik berbahaya, akan ditantang, dan berbagai pemangku kepentingan — termasuk laki-laki dan laki-laki — akan dilibatkan; serta (4) Berbasis bukti dan akuntabel. Bantuan Kanada akan diinformasikan oleh analisis berbasis gender dan akan mengandalkan akuntabilitas yang jelas untuk perencanaan, pencapaian, pelacakan, dan pelaporan hasil kesetaraan gender.

Tiga dekade terakhir telah melihat pengurangan dramatis dalam kemiskinan global, tetapi tidak semua orang mendapat manfaat yang sama. Ratusan juta orang, terutama perempuan dan anak perempuan, masih miskin, memiliki akses yang tidak merata ke sumber daya dan peluang, dan menghadapi risiko besar konflik kekerasan, iklim dan bahaya lingkungan, dan / atau ketidakamanan ekonomi dan politik. Dengan menghilangkan hambatan terhadap kesetaraan dan membantu menciptakan peluang yang lebih baik,

perempuan dan anak perempuan dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan meningkatkan kehidupan mereka sendiri dan keluarga mereka, masyarakat dan negara. Ini adalah cara ampuh untuk mengurangi kemiskinan bagi semua orang. Kanada adalah bagian dari komunitas global. Inilah sebabnya Kanada berinvestasi dalam bantuan internasional: membantu mengurangi kemiskinan dan kerentanan di seluruh dunia meningkatkan keamanan dan kemakmuran Kanada sendiri.

Kebijakan Bantuan Internasional Feminis Kanada mengakui bahwa mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan adalah cara terbaik untuk membangun dunia yang lebih damai, lebih inklusif, dan lebih sejahtera. Untuk melakukan ini, ia mendukung investasi yang ditargetkan, kemitraan, inovasi dan upaya advokasi dengan potensi terbesar untuk menutup kesenjangan gender dan meningkatkan peluang semua orang untuk sukses. Tetapi ia juga bekerja lintas bidang tindakan lain yang mencerminkan sifat kemiskinan multidimensi, dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bekerja dengan cara ini menghasilkan hasil pengembangan yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua orang, termasuk pria dan anak lelaki.

Bantuan internasional feminis Kanada akan membantu melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dari semua kelompok rentan dan terpinggirkan

dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang setara. Ini akan membantu perempuan dan anak perempuan mencapai akses yang lebih adil dan kontrol atas sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengamankan kesetaraan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Berkomitmen pada pendekatan feminis untuk bantuan internasional merupakan perubahan signifikan dalam cara kita bekerja. Pendekatan feminis lebih dari berfokus pada perempuan dan anak perempuan; melainkan, ini adalah cara paling efektif untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan.

c. Human environment

Budaya Kanada yang mengakui bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki komitmen yang sama terhadap perubahan sikap, perilaku dan peran yang mendukung kesetaraan gender.

Semua pemikir, penulis dan pengkaji politik internasional lewat perspektif feminis menempatkan gender sebagai pusat dari keseluruhan analisis yang dilakukan. Dengan demikian, menjadi penting dan wajib untuk memulainya dari definisi dan konsep tentang gender. Gender juga memuat hal-hal mengenai harapan masyarakat akan nilai apa yang dianggap baik dan buruk serta harapan akan peran yang dapat dimainkan oleh perempuan dan laki-laki di masyarakat. (Azizah, 2017) Pemikir feminis mengkaji lebih jauh konsep dasar tersebut, lebih hanya sekadar

soal seks atau gender; namun juga mempertanyakan secara kritis apa yang dianggap atau dipahami sebagai sesuatu yang esensial dan universal tersebut.

Dalam pandangan Kanada sendiri dalam memandang pengarusutamaan gender yakni strategi untuk menilai implikasi bagi laki-laki dan perempuan, dari setiap tindakan, kebijakan atau program yang direncanakan di semua bidang dan di semua tingkatan. Pendekatan ini mengakui perlunya memperhitungkan perbedaan sosial dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diusulkan telah menghasilkan hasil yang adil bagi perempuan dan laki-laki.(Government of Canada, 2017) Kanada telah berada di garis depan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan selama beberapa dekade, baik di dalam negeri maupun lewat bantuan pembangunan di luar negeri. *Dalam proyek yang dilakukan oleh Kanada dan Indonesia dalam Canada- Indonesia Trade and Private Sector Assistance* bertujuan untuk berkontribusi pada lingkungan pendukung ekspor yang lebih baik bagi UKM Indonesia yang dipimpin perempuan. TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, penelitian dan bantuan teknis bagi instansi pemerintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan organisasi masyarakat madani untuk informasi terkait perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, reformasi regulasi dan

promosi dagang dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga ahli dari organisasi pemerintah maupun swasta.

Ada semakin banyak bukti bahwa memajukan kewirausahaan perempuan membawa keuntungan bagi perekonomian maupun masyarakat. Namun di Indonesia dan Kanada, perempuan kurang terwakili di usaha kecil dan menengah (UKM) serta start-up (perusahaan rintisan), akibat terhambat sejumlah tantangan internal dan eksternal yang tidak hanya menghalangi pertumbuhan bisnis mereka, tapi juga kerap menempatkan perempuan pada posisi dirugikan dibanding rekan-rekan mereka yang laki-laki. Manfaat kewirausahaan perempuan di Indonesia dan Kanada tak akan sepenuhnya terwujud tanpa upaya mengatasi hambatan ini.

Oleh karena itu, dalam merealisasikan peran penting potensial perempuan ini, pada kenyataannya, pemerintah Indonesia telah berusaha sejak akhir krisis keuangan Asia untuk mendorong pengembangan kewirausahaan perempuan dengan mendukung pengembangan UMK melalui berbagai program karena usaha-usaha ini dianggap penting. Jalan untuk pengujian dan pengembangan kemampuan wirausaha perempuan. Program-program tersebut meliputi pelatihan kejuruan, bantuan teknis, pinjaman mikro dari bank dan lembaga keuangan formal lainnya, dan dukungan (dalam keuangan, teknis, pemasaran dan penyediaan bahan baku) yang disediakan oleh perusahaan milik negara melalui

program kemitraan. Banyak dari program ini diimplementasikan dalam kolaborasi dengan pemerintah asing seperti Australia, Kanada, organisasi PBB (UN Women) dan organisasi non-pemerintah internasional seperti Asia Foundation. Selain itu, pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan skema jaminan kredit publik (dikenal sebagai Kredit Bisnis Komunitas atau KUR) yang menargetkan terutama UMK, karena sebagian besar perusahaan kecil ini, terutama di sektor perdagangan, dimiliki atau dikelola oleh perempuan. (Tambunan, Women Entrepreneurs in MSEs in Indonesia: Their Motivations and Main Constraints, 2017) Baik pemerintah Kanada maupun pemerintah Indonesia berkomitmen pada konvensi serta agenda internasional yang mengukuhkan hak-hak perempuan untuk bekerja, memiliki properti, serta menjalankan bisnis dalam kondisi kesetaraan penuh dan bebas dari diskriminasi.

Dalam tujuan pengarusutamaan gender, TPSA melakukan berbagai penelitian untuk mencoba menjawab permasalahan apa yang terjadi dan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh TPSA akan melihat peran gender dalam UKM siap-mengekspor atau pengekspor dan perbedaan berbasis gender dalam akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan pengendalian manfaat dalam kaitannya dengan bisnis terutama dari analisis kualitatif.

2. Social structure and behaviours

a. Major common value orientation

Masyarakat Kanada dikenal sebagai masyarakat yang sopan, bijaksana, dan cinta damai. Masyarakatnya sangat menghargai toleransi, kerendahan hati, dan tanpa kekerasan. Masyarakat Kanada memiliki sifat dan kebiasaan masing-masing. Beberapa bahkan berani mengatakan bahwa sifat bervariasi dari satu provinsi ke provinsi berikutnya. (Live&Learn, 2016)

Nilai egalitarianism dalam masyarakat Kanada menganggap semua orang setara. Inilah sebabnya mengapa hierarki tidak terlalu jelas. Setiap orang berhak atas persamaan hak dan peluang dalam masyarakat ini tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras atau kepercayaan.

Kebenaran politik adalah menahan diri dari mengatakan atau melakukan hal-hal yang mengecualikan, menghina atau memarginalkan kelompok orang. Dan karena Kanada beragam dan multikultural, mengetahui bagaimana menjadi benar secara politis sangat penting untuk hidup harmonis dengan semua orang.

Nilai-nilai Kanada adalah nilai etika dan kemanusiaan Kanada yang umum dimiliki bersama. Partai-partai politik besar telah secara eksplisit mengklaim bahwa mereka menjunjung tinggi nilai-nilai ini, tetapi menggunakan generalisasi untuk

menentukannya. Justin Trudeau setelah menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2015 mencoba mendefinisikan apa artinya menjadi orang Kanada, mengatakan bahwa Kanada tidak memiliki identitas tertentu tetapi memiliki nilai bersama (Lawson, 2015):

“There is no core identity, no mainstream in Canada,” he claimed. “There are shared values — openness, respect, compassion, willingness to work hard, to be there for each other, to search for equality and justice. Those qualities are what make us the first postnational state.”

Beberapa percaya bahwa Elsie MacGill mendefinisikan nilai Kanada. Dia adalah pelopor wanita dalam bidang teknik dan bisnis, pahlawan perang dan panutan. Bagian 15 dari *Canadian Charter of Rights and Freedoms* melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Canadian Charter of Rights and Freedoms, yang sangat dipromosikan oleh Perdana Menteri Pierre Trudeau, diadopsi pada tahun 1982. Piagam tersebut menjamin hak-hak politik tertentu bagi warga negara Kanada dan hak-hak sipil semua orang di Kanada dari kebijakan dan tindakan semua bidang dan tingkat pemerintahan. Ini dirancang untuk menyatukan orang Kanada di seKanadar seperangkat prinsip yang mewujudkan hak-hak itu. Bahkan sebelum ia memasuki dunia politik, Trudeau telah

mengembangkan konsep piagamnya terutama sebagai ekspresi dari nilai-nilai umum Kanada (Kernerman & Resnick, 2005). Trudeau mengatakan bahwa berkat Piagam, Kanada sendiri sekarang dapat didefinisikan:

“Canada is a society where all people are equal and where they share some fundamental values based upon freedom. The search for this Canadian identity, as much as my philosophical views, had led me to insist on the charter.”

Sejarah Kanada telah dibentuk oleh banyak wanita yang bekerja keras untuk mempromosikan dan menegakkan kesetaraan gender di Kanada. Wanita memperjuangkan sejumlah hak asasi manusia penting yang telah menjadi nilai-nilai inti Kanada - hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi dan federal, hak untuk memiliki properti, hak untuk mendapatkan upah yang adil, dan akhirnya, hak untuk diakui sebagai “*persons*” dibawah hukum.

b. Major institutional pattern

Pola kelembagaan yang utama dalam pengambilan keputusan bantuan pembangunan Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance yaitu dipengaruhi oleh lembaga *Global Affairs Canada* dan *Department Women and Gender Equality Canada (WAGE)*.

Global Affairs Canada merupakan institusi di Kanada yang mengelola hubungan diplomatik Kanada, menyediakan layanan konsuler untuk warga Kanada, mempromosikan perdagangan internasional negara itu, dan memimpin pembangunan internasional Kanada dan bantuan kemanusiaan. Sedangkan *Department Women and Gender Equality Canada* (WAGE) bekerja untuk memajukan kesetaraan bagi perempuan dengan memfokuskan upayanya dalam tiga bidang prioritas: meningkatkan keamanan ekonomi dan kemakmuran perempuan; mendorong kepemimpinan perempuan dan partisipasi demokratis; dan mengakhiri kekerasan berbasis gender. Status Perempuan Kanada juga memainkan peran kepemimpinan dalam implementasi Analisis Plus Berbasis Gender (GBA+) berbasis pemerintah.

Kerangka kerja dibuat untuk menilai kemajuan penerapan Kebijakan Global Affairs Kanada tentang Kesetaraan Gender. Ini pada dasarnya memfokuskan pengukuran kinerja di mana Global Affairs Kanada telah memilih untuk fokus, dan mengidentifikasi apa hasil aktual yang akan diukur. Kesetaraan gender adalah area hasil utama dan tema pemrograman lintas sektoral, kerangka kerja dirancang untuk menilai kinerja institusi.

Pembaruan 1999 untuk Kebijakan Global Affairs Kanada tentang Kesetaraan Gender mencerminkan konsensus antara Global Affairs Kanada dan mitra pembangunannya (termasuk pemerintah

mitra dan lembaga bantuan pembangunan lainnya) bahwa kesetaraan gender adalah tujuan pembangunan yang penting dalam haknya sendiri, dan juga merupakan bagian integral dari pencapaian pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen internasional Kanada terhadap kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama Platform untuk Aksi 1995 yang disahkan di Beijing (dan ditegaskan kembali pada 2005) dan CEDAW, di mana Kanada dan sebagian besar mitra pembangunan adalah penandatangan.

Berdasarkan Global Affairs Kanada tentang Kesetaraan Gender, hasil keseluruhan atau dampak yang ingin disumbangkan oleh Global Affairs Kanada adalah "kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk memastikan pembangunan berkelanjutan." Kebijakan ini juga mengidentifikasi tiga tujuan institusi yang dapat disajikan kembali dalam bentuk hasil sebagai berikut; (1) Pengambilan keputusan. Partisipasi yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam membentuk pembangunan berkelanjutan di masyarakat mereka; (2) Hak. Perempuan dan anak perempuan lebih mampu mewujudkan hak asasi mereka sepenuhnya; (3) Sumber daya dan manfaat pengembangan. Mengurangi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam akses dan kontrol atas sumber daya dan manfaat pembangunan. (Canada, 2017)

Ini adalah hasil yang dapat disumbangkan oleh Global Affairs Kanada, tetapi tidak akan tercapai dengan sendirinya. Oleh karena itu kinerja Global Affairs Kanada perlu fokus pada sifat dan pentingnya kontribusi tambahan yang dibuat melalui investasi Global Affairs Kanada dalam inisiatif tertentu. Sementara hasil yang diharapkan dari kesetaraan gender telah diidentifikasi di tingkat institusi, hasil aktual dari Global Affairs Kanada dan kontribusinya terhadap kesetaraan gender tergantung pada keputusan yang dibuat dalam pemilihan, desain dan pengelolaan investasi tertentu. Investasi ini dapat dilakukan melalui salah satu dari tiga model bisnis Global Affairs Kanada (pemrograman direktif, pemrograman responsif, dan pendanaan inti / dukungan kelembagaan), merespons berbagai sektor prioritas (seperti tata kelola, sektor swasta, kesehatan, pendidikan) dan menggunakan berbagai pendekatan (dari pengembangan masyarakat hingga pengembangan kapasitas kelembagaan). Sebagian besar investasi ini tidak memiliki kesetaraan gender sebagai tujuan utama mereka. Namun, sejauh mereka mempengaruhi orang, semua investasi ini berpotensi memiliki efek positif (atau negatif) pada kesetaraan gender.

Lembaga atau mitra Negara yang menerima pendanaan inti umumnya memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan Global Affairs Kanada. Dengan pendanaan inti, Global Affairs Kanada bertujuan untuk mencapai hasil

pembangunan secara tidak langsung melalui dukungan kepada mitra dengan kebijakan, prioritas dan pendekatan yang sesuai dengan yang ada. Global Affairs Kanada. Pelaporan kinerja oleh lembaga-lembaga ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya mereka dari semua sumber dalam mendukung tujuan kebijakan kelembagaan. Untuk pendanaan inti berfokus pada kualitas strategi kelembagaan dan mekanisme untuk mencapai hasil pengembangan kesetaraan gender, dengan perhatian khusus pada pemantauan dan pelaporan hasil kesetaraan gender.

Tabel 4.1: Tinjauan skematis pendekatan untuk pemrograman direktif dan responsive terhadap kesetaraan gender

No	Corporate Development Result	Elemen
1	Decision Making - Partisipasi yang lebih setara dari perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam membentuk pembangunan berkelanjutan masyarakat mereka	1.1 Capacity for public participation. Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan.
		1.2 Representation among decision makers. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses demokrasi dan dalam posisi pengambilan keputusan di lembaga mitra, sektor sasaran, komunitas mitra.
		1.3 Household and individual decision making. Hubungan kekuasaan yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki di tingkat rumah tangga, meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan masing-masing perempuan.
2	Rights - Perempuan dan anak perempuan lebih mampu mewujudkan hak asasi mereka sepenuhnya.	2.1 Legal system. Memperkuat promosi dan perlindungan hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi, jaksa, hakim, dan pengadilan.
		2.2 Public awareness. Peningkatan pengetahuan dan pengakuan oleh masyarakat umum (perempuan dan laki-laki) dan pembuat keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan.
		2.3 Response to gender-specific rights violations. Layanan dan mekanisme yang ditingkatkan menanggapi kendala spesifik gender tentang pelanggaran hak atau hak (mis., Kekerasan terhadap perempuan / anak perempuan, perdagangan manusia, kekerasan seksual di zona konflik).
3	Development Resources and Benefits. Mengurangi ketidakesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam akses dan kontrol atas sumber daya dan manfaat pembangunan.	3.1 Livelihoods and productive assets. Peningkatan kontrol oleh perempuan atas aset produktif (tanah, modal / kredit, teknologi, keterampilan) dan peningkatan akses ke pekerjaan yang layak.
		3.2 Institutional capacity. Peningkatan kapasitas lembaga mitra, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.
		3.3 Policy change. Penerapan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh lembaga yang mengelola sumber daya dan manfaat pembangunan (mis., Kebijakan menanggapi berbagai prioritas dan kepentingan perempuan / laki-laki, perempuan / laki-laki).

		3.4 <i>Well-being and basic needs</i> . Akses oleh wanita ke layanan dasar dan tepat yang mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup.
--	--	---

Proyek bantuan sebagai kerangka kerja umum untuk mempertimbangkan kontribusi pada kesetaraan gender oleh proyek-proyek di berbagai sektor dan sarana untuk menggabungkan kontribusi yang beragam ini untuk memberikan tinjauan tentang seberapa baik Global Affairs Kanada menerapkan kebijakan tentang kesetaraan gender; dan suatu dasar untuk membuat keputusan berdasarkan informasi untuk fase tindak lanjut dari penilaian tentang masalah yang akan membenarkan perhatian lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelajaran dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil.

Sedangkan *Department Women and Gender Equality Canada (WAGE)* bekerja untuk memajukan kesetaraan bagi perempuan dengan memfokuskan upayanya dalam tiga bidang prioritas: meningkatkan keamanan ekonomi dan kemakmuran perempuan; mendorong kepemimpinan perempuan dan partisipasi demokratis; dan mengakhiri kekerasan berbasis gender. Status Perempuan Kanada juga memainkan peran kepemimpinan dalam implementasi Analisis Plus Berbasis Gender (GBA +) berbasis pemerintah.

Pekerjaan yang dilakukan oleh WAGE yakni diantaranya: (1) Bekerja sama dengan mitra provinsi / teritorial dan Pemimpin atau Perwakilan Adat Nasional, yang

keterlibatannya sangat penting untuk memajukan kesetaraan gender; (2) Memimpin partisipasi Kanada dalam PBB tentang Status Wanita dan mendukung upaya untuk memajukan kesetaraan gender melalui United Nations System Organizations; (3) Mengembangkan laporan nasional tentang implementasi Beijing Declaration and Platform for Action; (4) Bekerjasama dengan Global Affairs Kanada untuk memimpin partisipasi Kanada dalam KTT internasional, pertemuan dan acara yang berkaitan dengan kesetaraan gender seperti Women Deliver Conference; (5) Menjaga keterlibatan aktif dalam pengembangan strategi Kanada untuk memajukan dan mencapai Agenda 2030 PBB dan Sustainable Development Goals; dan (6) Memberikan saran dan rekomendasi untuk mendukung Canada's Feminist Foreign Policy, termasuk agenda perdagangan progresif dan Kebijakan Bantuan Internasional Feminis sebagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara internasional. (WAGE, 2019)

Tabel 4.2: Kerangka Kerja *Department Women and Gender Equality Canada (WAGE)*

Departmental Results Framework	Tanggung jawab inti: Memajukan Kesetaraan Gender		Internal Services
	<p>Hasil Departemen 1: Intervensi Departemen memfasilitasi kemajuan kesetaraan gender</p>	<p>Indikator 1: Persentase proyek yang didanai oleh Departemen yang berdampak pada pengurangan hambatan sistemik terhadap kesetaraan gender</p>	
		<p>Indikator 2: Persentase pemangku kepentingan yang menerapkan pengetahuan atau sumber daya dari Pusat Pengetahuan Kekerasan Berbasis Gender</p>	
		<p>Indikator 3: Jumlah kemitraan atau koalisi dengan pemerintah, dan internasional, Pribumi, masyarakat sipil, sektor swasta, perempuan dan organisasi pencari kesetaraan</p>	
		<p>Indikator 4: Jumlah data pemerintah federal dan kesenjangan penelitian yang diisi sebagaimana diidentifikasi oleh Komite Antar Departemen tentang Kesetaraan Gender</p>	
	<p>Hasil Departemen 2: Pemerintah federal secara sistematis mempertimbangkan kesetaraan gender</p>	<p>Indikator 5: Persentase organisasi federal yang puas dengan alat dan sumber daya Departemen untuk memasukkan pertimbangan kesetaraan gender ke dalam pekerjaan mereka</p>	
		<p>Indikator 6: Jumlah inisiatif federal baru utama (mis., Kebijakan dan program) yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk memajukan kesetaraan gender</p>	
Program Inventory	Program: Expertise and Outreach Program: Community Action and Innovation		
	Program: Expertise and Outreach Program: Community Action and Innovation		

c. Major characteristics of social organizations

Karakter bersifat formal karena memiliki struktur, identitas, waktu diatur secara resmi, pengorganisasian, visi dan misi, tujuan yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi berdasarkan nilai dan norma yang dianut.

d. Role differentiation and specialization

Adanya kesetaraan gender untuk persamaan akses dan kesempatan perempuan dan laki-laki disegala bidang. Kanada dan masyarakatnya percaya bahwa dengan adanya kesetaraan gender akan meningkatkan dan memperbaiki suatu kondisi Negara. Perempuan memiliki peran yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan dengan adanya pemberdayaan perempuan merupakan salah satu faktor dari suksesnya suatu pembangunan.

Melalui pengembangan internasional dan inisiatif perdamaian dan keamanan Kanada, masyarakat Kanada mendukung upaya internasional untuk meningkatkan peran perempuan dan anak perempuan. Diketahui bahwa sejak dahulu pergerakan masyarakat Kanada untuk memperjuangkan kesetaraan gender dengan mendukung hak-hak yang dimiliki oleh perempuan membuahkan hasil setelah upaya yang telah dilakukan dengan mengajukan tuntutan kepada Negara.

Nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Kanada mengenai adanya kesetaraan hak untuk setiap orang membuat masyarakat Kanada peduli terhadap kondisi perempuan yang sering kali mendapatkan diskriminasi dalam akses dan kesempatan yang dimiliki. Kedamaian dan kemakmuran adalah hak asasi setiap orang. Saat ini sebagai orang Kanada, Kanada memiliki peluang besar untuk membantu orang-orang di negara berkembang di dunia bergabung dengan kelas menengah global dan sistem multilateral yang mendukungnya.

Penting untuk mengingatkan diri Kanada sendiri mengapa Kanada melangkah — mengapa Kanada mencurahkan waktu dan sumber daya untuk kebijakan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan pembangunan: Warga Kanada lebih aman dan lebih makmur ketika lebih banyak dunia yang berbagi nilai-nilai Kanada.

Kesetaraan gender tidak dapat dicapai oleh perempuan dan anak perempuan secara terpisah. Pria dan anak laki-laki juga harus menentang tradisi dan adat istiadat yang mendukung dan mempertahankan ketidaksetaraan gender. Karena norma-norma sosial dan stereotip gender juga membatasi laki-laki dan anak laki-laki dalam peran sosial dan keluarga mereka, adalah penting bahwa laki-laki dan anak laki-laki dilibatkan dalam perjuangan untuk kesetaraan gender yang lebih besar, diberi kesempatan untuk mengadvokasi kesetaraan gender, dan didorong untuk

memimpin dengan memberi contoh dalam menghormati dan mempromosikan kepentingan perempuan dan anak perempuan. (Canada, 2019)

Sangat penting untuk mengubah sikap anak laki-laki remaja, karena konstruksi gender dibentuk selama masa remaja. Terlibat dengan remaja laki-laki memberikan peluang terbaik untuk mempromosikan norma-norma gender positif dan mencegah berlanjutnya stereotip negatif sepanjang hidup mereka.

e. Groups: kinds and functions

Kelompok-kelompok yang menyebarkan nilai dan norma mengenai gender equality merupakan mayoritas berbentuk kelompok formal. Kelompok tersebut memiliki visi misi yang jelas dan terstruktur. Untuk menyebarkan kesadaran *gender equality* dan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Selama beberapa dekade, perempuan di seluruh dunia telah memimpin perjuangan untuk kesetaraan gender. Organisasi perempuan lokal yang memajukan hak-hak perempuan, khususnya di tingkat paling dasar, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran sosial dan memobilisasi masyarakat untuk mengubah undang-undang, sikap, norma dan praktik sosial.

Untuk memperkuat suara perempuan di seluruh dunia, Kanada akan berkolaborasi

dengan mitra untuk menguji coba, merancang, dan memperjuangkan cara-cara baru dan inovatif untuk bekerja dengan organisasi perempuan setempat yang memajukan hak-hak perempuan. (Canada, 2019)

f. Relevant social process (opinion formation, adult socialization, political)

Women Movement di Kanada yang menyuarakan mengenai hak-hak perempuan seperti hak memilih dan dipilih sehingga perempuan dapat menyampaikan aspirasinya untuk mempengaruhi kebijakan Negara.

Salah satu langkah awal menuju kesetaraan bagi wanita Kanada adalah legalisasi hak properti wanita yang sudah menikah. Dimulai di Ontario pada tahun 1884 dan Manitoba pada tahun 1900, *Married Women's Property Act* memberi perempuan yang menikah di provinsi-provinsi ini hak hukum yang sama dengan laki-laki, yang memungkinkan perempuan untuk dapat masuk ke dalam perjanjian hukum dan membeli properti. Sisa provinsi dan teritori mengikuti dengan lambat, dengan Quebec akhirnya menandatangani *Married Women's Property Act* pada tahun 1964; *Civil Code of Québec* diamandemen untuk memberi perempuan yang menikah hak hukum dan hak milik penuh.

Tonggak penting lainnya untuk hak-hak perempuan adalah mendefinisikan

"orang" di bawah *British North America Act*, 1867. Lima Terkenal, Henrietta Muir Edwards, Nellie McClung, Louise McKinney, Emily Murphy dan Irene Parlby, mengajukan petisi kepada pemerintah pada tahun 1928 untuk meminta Mahkamah Agung Kanada untuk memutuskan apakah "orang" dalam Undang-undang termasuk perempuan. Mahkamah Agung memutuskan bahwa itu tidak, karena alasan berikut: (1) *British North America Act* pada tahun 1928 harus mempertahankan makna "orang" akan diberikan oleh pengadilan ketika disahkan pada tahun 1867; (2) Menurut hukum umum, perempuan tidak bisa memegang jabatan politik; (3) Jika Parlemen Inggris bermaksud agar perempuan dimasukkan sebagai "orang-orang yang memenuhi syarat" di bawah pasal 24 Undang-Undang, itu akan mengatakan demikian.

Namun, banding ke Dewan Penasihat diluncurkan. Pada tahun 1929, Dewan memutuskan kata "orang" itu sendiri tidak jelas, dan akan lebih dipahami jika *British North America Act* diberi interpretasi yang lebih luas. Oleh karena itu, jika undang-undang itu mengecualikan perempuan secara khusus, itu seharusnya dinyatakan dengan jelas dalam UU. Sejak saat itu kemudian perempuan dianggap "orang" di bawah hukum. Hanya satu tahun kemudian, pada tahun 1930, Cairine Reay Wilson menjadi wanita pertama yang ditunjuk untuk menjadi Senat.

Pada awal abad ke-20, perempuan tidak diberi hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi dan federal. Ini mulai berubah pada tahun 1916 ketika perempuan memenangkan hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi di Manitoba, Saskatchewan dan Alberta. British Columbia dan Ontario memberi perempuan hak untuk memilih pada tahun 1917. Pada tahun yang sama, Kanada meloloskan *War-time Elections Act*, yang memberi perempuan di militer dan mereka yang memiliki saudara lelaki yang berperang dalam Perang Dunia I hak untuk memilih. Pada 1918, semua wanita Kaukasia memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan federal. Pada titik ini, masih banyak provinsi di mana perempuan tidak diizinkan untuk memilih dalam pemilihan provinsi. Selain itu, banyak kelompok minoritas ditolak haknya untuk memilih. Provinsi terakhir yang memperpanjang hak untuk memilih dalam pemilihan provinsi untuk perempuan adalah Quebec, pada tahun 1940. Wilayah Barat Laut adalah wilayah terakhir, yang memberi perempuan hak untuk memilih pada tahun 1951. Mulai tahun 1947, hak untuk memilih diperluas ke beberapa minoritas kelompok, dan pada tahun 1960, semua warga Kanada diberikan hak untuk memilih, termasuk pria dan wanita Aborigin. (Canada, 2017)

Salah satu langkah besar pertama menuju kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam angkatan kerja adalah *Fair Employment Practices Act* dan *Female*

Employees Fair Remuneration Act di Ontario, pada tahun 1951. *Female Employees Fair Remuneration Act* bertujuan untuk menghapus diskriminasi dengan menerapkan denda dan menciptakan sistem pengaduan. *Female Employees Fair Remuneration Act* dirancang untuk memberi perempuan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Provinsi dan wilayah Kanada lainnya dengan cepat mengikuti jejak Ontario dalam mengadopsi tindakan provinsi serupa untuk memastikan kesetaraan dalam angkatan kerja.

Ini juga menyebabkan pemerintah federal meloloskan tiga tindakan berikut: (1) *Canada Fair Employment Practices Act* tahun 1953, yang diterapkan pada layanan sipil; (2) *Female Employees Equal Pay Act* tahun 1956, yang membuat diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin terhadap hukum; dan (3) *Employment Equity Act* tahun 1986, yang berlaku untuk karyawan yang diatur oleh pemerintah federal dan mengharuskan pengusaha untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang tidak perlu yang membatasi peluang kerja. (Canada, 2017)

Setelah adanya pergerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan mendorong Negara dan masyarakat Kanada peduli dengan adanya kesetaraan gender. Seiring dengan berjalannya waktu nilai-nilai tersebut tertanam kepada masyarakat Kanada sehingga sadar akan pentingnya

kesetaraan gender. Pergerakan wanita yang telah berhasil tersebut memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat lainnya sehingga semakin banyaknya pergerakan wanita yang ada saat ini di Kanada.

Dengan adanya hasil pergerakan yang berhasil mendorong pemerintah Kanada untuk mengeluarkan undang-undang mengenai hak memilih dan dipilih bagi perempuan membuat kepentingan perempuan di parlemen terwakilkan. Adanya perwakilan perempuan di pemerintah akan memberikan dampak yang baik bagi masa depan perempuan di sebuah Negara karena aspirasi perempuan akan semakin didengar.

B. Faktor Eksternal Kanada memasukkan Gender dalam Bantuan Canada-Indonesia Trade And Private Sektore Assistance 2014-2019

Dalam faktor eksternal pembuat kebijakan memiliki aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu keputusan yakni lingkungan non-manusia dari negara *lain (Non-Human Environment)*, kebudayaan atau kebiasaan yang berkembang di wilayah lain (*Other Cultures*), masyarakat lain (*Other Societies*), masyarakat yang terorganisir dan fungsi negara serta tindakan pemerintah (*Societies Organized and Functioning States. Government Action*).

Faktor eksternal yang memengaruhi Pemerintah Kanada untuk memasukkan aspek gender pada bantuan *Canada-Indonesia Trade And Private Sektore Assistance 2014-2019* adalah karena perempuan di Indonesia adalah ketimpangan gender

di Indonesia masih tinggi dan adanya rejim internasional yang diikuti oleh Kanada dan Indonesia (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dan *Sustainable Development Goals*(SDG)). Menggunakan konsep rejim internasional dimana apabila suatu negara telah meratifikasi sebuah rejim maka harus mencerminkannya pada setiap kebijakan yang dibuat untuk menunjukkan komitmen suatu negara. Namun, hubungan antara perempuan dan rejim internasional mengenai perempuan saling terkait satu sama lain dimana kondisi perempuan saat ini masih banyak mendapatkan diskriminasi sehingga dibentuknya suatu rejim internasional guna menanggulangi hal tersebut. Oleh karena itu, isu perempuan harus menjadi perhatian dalam pembangunan karena perempuan erat sebagai elemen penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Penjelasan mengenai factor eksternal yang melatarbelakangi Kanada memberikan bantuannya ke Indonesia akan di bagi menjadi dua yakni faktor kondisi di Indonesia dan rejim internasional yang diikuti oleh Kanada dan Indonesia.

1. Faktor Kondisi Perempuan di Indonesia

Ada semakin banyak bukti bahwa memajukan kewirausahaan perempuan membawa keuntungan bagi perekonomian maupun masyarakat. Namun di Indonesia dan Kanada, perempuan kurang terwakili di usaha kecil dan menengah (UKM) serta start-up (perusahaan rintisan), akibat terhambat sejumlah tantangan internal dan eksternal yang tidak hanya menghalangi pertumbuhan bisnis

mereka, tapi juga kerap menempatkan perempuan pada posisi dirugikan dibanding rekan-rekan mereka yang laki-laki. Manfaat kewirausahaan perempuan di Indonesia dan Kanada tak akan sepenuhnya terwujud tanpa upaya mengatasi hambatan ini. Dukungan kewirausahaan perempuan di Indonesia masih pada tahap dini.

Seiring dengan globalisasi yang mengakibatkan mudahnya transfer segala hal dari tempat ke tempat lainnya, isu kesetaraan gender menjadi isu yang relevan saat ini. Isu yang menyangkut dengan keterpaduan antara kerjasama perempuan dan laki-laki di segala bidang. Indonesia merupakan salah satu Negara yang sudah berkomitmen untuk menangani isu tersebut. Hal tersebut dapat dilihat diantaranya yakni Indonesia mengeluarkan INPRESS Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat Negara, Gubernur dan Bupati untuk melaksanakan PUG diseluruh wilayah Indonesia. Meskipun hal tersebut telah dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa ketimpangan gender di Indonesia masih terjadi, masih terdapat gap capaian manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. (Sitorus, 2016)

Jumlah absolut pengusaha perempuan di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkirakan bahwa ada 55.206.444 usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) di negara ini, di mana 60%, atau 33 Juta, dimiliki oleh perempuan, mewakili hampir seperempat dari tenaga kerja aktif. Global Entrepreneurship Monitor 2014 memperkirakan bahwa dari total populasi wanita dewasa di Indonesia sebesar 85 juta, sebanyak 26%, atau 22 juta adalah pengusaha aktif. Walaupun perkiraan berbeda-beda karena perbedaan klasifikasi pengusaha perempuan dan data yang tidak lengkap, semua perkiraan menunjukkan tingginya jumlah pengusaha perempuan di Indonesia, dan proporsi yang sangat tinggi dari populasi perempuan dewasa yang terlibat dalam kewirausahaan. (Arsana & Alibhai, 2016)

Sebagian besar program ditujukan bagi perempuan yang bergerak dalam usaha mikro; hanya sedikit program yang fokus pada UKM dan start-up milik perempuan. Program-program yang ada umumnya didorong oleh sektor swasta (terutama perusahaan), lembaga pembangunan internasional, dan pemerintah asing. Banyak hambatan yang dihadapi pengusaha perempuan yang belum teratasi, seperti keterbatasan modal untuk UKM (sering disebut “missing middle” (bagian tengah yang hilang)), kurangnya program-program pengembangan keterampilan yang sesuai kebutuhan mereka, dan minimnya akses ke jaringan bisnis. Beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pelaku usaha juga menghambat keberhasilan mereka. Sebaliknya, Kanada telah menetapkan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang mendukung dan mempromosikan kewirausahaan perempuan dalam UKM dan start-up. Pemerintah di semua tingkatan, perguruan tinggi, dan sektor swasta

turut mengambil bagian dalam memajukan kewirausahaan perempuan, berbagi tujuan yang sama dan bertindak sinergis, tanpa tumpang tindih peran. Pendekatan program-program ini bersifat holistik, mengatasi kebutuhan pengusaha perempuan dari tahap rintisan hingga cukup mapan, dan tersedia di hampir semua provinsi dan wilayah. (Dea, 2019)

Sebagian besar bisnis di Indonesia berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu sebanyak 99,99 persen dari total pendirian bisnis di negara ini, dan jumlah mereka terus meningkat setiap tahun (Tabel 1). Mayoritas perusahaan tersebar luas di seluruh daerah pedesaan, dan, oleh karena itu, cenderung memainkan peran penting dalam membantu mengembangkan keterampilan penduduk desa, tidak hanya keterampilan teknis tetapi juga kewirausahaan, terutama bagi perempuan. Namun, kebanyakan dari mereka, terutama UMK dilakukan atau dibentuk oleh rumah tangga miskin atau individu yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik di tempat lain, baik sebagai sumber pendapatan primer atau sekunder (tambahan) mereka. Banyak perempuan yang ditemukan melakukan bisnis mereka sendiri di UMK tidak benar-benar didorong oleh semangat kewirausahaan mereka yang tinggi tetapi terutama karena ada yang miskin dan tidak ada kegiatan penghasil pendapatan lain yang lebih baik tersedia bagi mereka. Oleh karena itu, keberadaan atau tumbuhnya UMK di Indonesia sering dianggap sebagai akibat dari pengangguran atau kemiskinan, bukan sebagai cerminan semangat kewirausahaan. (Tambunan, Women

Entrepreneurs in MSEs in Indonesia: Their Motivations and Main Constraints , 2017)

Tabel 4.3: Total Perusahaan Berdasarkan Kategori Ukuran di Semua Sektor Ekonomi di Indonesia, 2006-2013 (dalam ribuan unit)

Size category	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
MIEs	48512438	49608953	50847771	52176771	53504416	54559969	55856176	57189393
SEs	472602	498565	522124	546643	568397	602195	629418	652222
MEs	36763	38282	39717	41336	42008	4428	48997	52106
LEs	4577	4463	4650	4676	5150	4952	4968	5066
Total	49026380	50150263	51414262	52769426	54119971	55171544	56539559	57898787

Notes: MIEs = microenterprises; SEs= small enterprises; MEs=medium enterprises; LEs=large enterprises.

Sources: processed data from the State Ministry of CSMEs (:www.depkop.go.id) and BPS (www.bps.go.id).

Dapat dihipotesiskan bahwa ada hubungan positif (negatif) antara tingkat partisipasi perempuan sebagai pengusaha dan kesetaraan gender (ketimpangan), ceteris paribus, faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah pengusaha perempuan adalah konstan. Dengan demikian, jumlah pengusaha perempuan yang relatif rendah di banyak negara, terutama negara berkembang / berpenghasilan rendah, dapat mencerminkan, di antara masalah lain, kurangnya kesetaraan gender di negara-negara ini.

Tingkat kesetaraan gender saat ini (atau ketidaksetaraan) dapat dilihat dari sejumlah indeks. Pertama, *Global Gender Inequality*

Index dari World Economic Forum (WEF), yang mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di empat bidang, partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik. Dengan mengacu pada Indonesia, misalnya pada tahun 2014, Indonesia berada di peringkat ke-95 dari 136 negara, dan pada tahun 2015, posisi Indonesia telah meningkat, meskipun sedikit, menjadi 92 dari 145 negara. Sehubungan dengan partisipasi dan peluang ekonomi, Indonesia berada pada posisi yang sangat rendah, yaitu 114, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di negara ini masih mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi (Tabel 2). Meskipun, indikator partisipasi ekonomi dan peluang tidak berfokus secara khusus pada kewirausahaan, fakta ini mungkin mengindikasikan bahwa Indonesia masih perlu bekerja agar tidak hanya meningkatkan jumlah wirausaha perempuan tetapi, yang lebih penting, jumlah perempuan yang besar dan menguntungkan bisnis.

Tabel4.4 : Peringkat Global dari Negara-negara Anggota ASEAN menurut Global Gender Gap Index and Its Sub-indexes, 2015

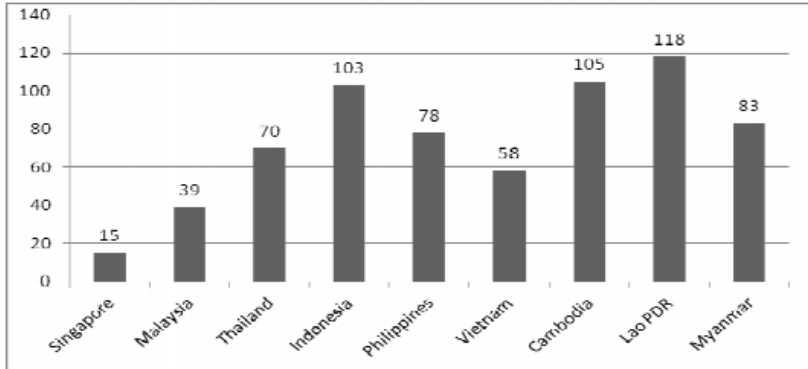
Member states	Global Gender GAP Index	Economic participation and opportunity	Indicator		
			Educational attainment	Health and survival	Political empowerment
Philippines	7	16	34	1	17
Leo PDR	52	11	116	92	84
Singapore	54	9	111	122	92
Thailand	60	19	67	1	131
Vietnam	83	41	114	139	88
Brunei Darussalam	88	23	70	131	145
Indonesia	92	114	89	60	71
Cambodia	109	63	127	1	109
Malaysia	111	95	100	110	134

Source: WEF (2015)

(145 negara)

Kedua, *Gender Inequality Index* dari UNDP, yang merupakan ukuran gabungan yang mencerminkan ketimpangan dalam pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi pasar tenaga kerja. Pada 2012, skor untuk Indonesia adalah 0,494 (0 = kesetaraan; 1 = ketidaksetaraan), yang paling tidak setara di ASEAN (dengan Singapura sebagai negara anggota yang paling setara), dan pada 2013 skor meningkat sedikit menjadi 0,500 atau berada pada peringkat 103 dari 152 negara, atau di ASEAN pada posisi ke 7 dari 9 negara anggota yang termasuk dalam laporan (Gambar 4.1).

Gambar 4.1: Peringkat Global Anggota Negara ASEAN berdasarkan Gender Inequality Index, 2013 (152 countries)



Source: UNDP (2014).

Berbagai tulisan kini memunculkan kesepakatan bahwa, dalam konteks integrasi perdagangan dan globalisasi yang berlangsung saat ini, peningkatan perdagangan mempertinggi penghasilan masyarakat miskin dan biaya transisi ke kondisi ekonomi yang lebih terbuka pada umumnya rendah bila dibandingkan dengan manfaatnya secara keseluruhan. Laporan Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) pada 2013 menyebutkan ratusan juta orang dientaskan dari kemiskinan setidaknya sebagian berkat terbukanya akses perdagangan. (UNDP, 2013)

Namun, pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, setidaknya dalam jangka pendek, beberapa kelompok tidak memperoleh manfaat sebanyak kelompok lainnya dari liberalisasi perdagangan atau dari berbagai

prakarsa lain yang terkait dengan pembukaan pasar baru. Perusahaan di seluruh dunia mengabaikan kewajiban hukum mereka kepada pekerja dengan mengganti pekerjaan permanen dengan kontrak dan pekerjaan sementara. Pekerja tidak tetap adalah mereka yang memenuhi kebutuhan pekerjaan permanen tetapi ditolak hak-hak karyawan tetap. Secara global, para pekerja ini tunduk pada pekerjaan yang tidak stabil, upah yang lebih rendah dan kondisi kerja yang lebih berbahaya. Mereka jarang menerima tunjangan sosial dan seringkali ditolak haknya untuk bergabung dengan serikat pekerja. Bahkan ketika mereka memiliki hak untuk berserikat, pekerja takut untuk berorganisasi jika mereka tahu mereka mudah diganti. Perempuan, minoritas dan pekerja migran jauh lebih mungkin untuk mengisi jenis pekerjaan ini. Kelompok tersebut sering mencakup perempuan dalam usaha manufaktur berorientasi ekspor yang terlibat dalam pekerjaan rentan bahaya (precarious work), selain juga kelompok UKM yang dimiliki atau dijalankan oleh perempuan. (International Labor Rights Forum)

Sementara perempuan terkonsentrasi di sektor informal, seringkali dalam wirausaha, mereka juga kurang terwakili sebagai pengusaha. Ini sering dikaitkan dengan kesulitan mereka mengakses sumber daya keuangan yang membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan bisnis dan menjalankan kemampuan kewirausahaan mereka. Namun, bukti tentang hal ini beragam dan penelitian lebih lanjut di bidang ini diinginkan. Meningkatkan pemahaman Kanada tentang

hambatan gender terhadap kewirausahaan dan ekspansi bisnis juga penting dan patut untuk dikaji. Demikian pula, dengan cermat memeriksa keputusan masuk dan masuk kembali ke pasar tenaga kerja dan interaksinya dengan tanggung jawab kepedulian dan gerakan di sektor ketenagakerjaan akan menghasilkan pemahaman baru tentang partisipasi perempuan.

Diperkirakan bahwa di Indonesia hanya 23% dari Usaha Mikro Kecil (UKM) dimiliki oleh perempuan (Foundation, 2013). Hambatan sistematis terhadap kewirausahaan mencegah perempuan dari peluang ekonomi di seluruh dunia. Ini tidak hanya dapat membatasi peluang perempuan untuk memulai bisnis tetapi juga dapat membatasi bisnis yang didirikan dengan skala yang sangat kecil, seringkali hanya beroperasi di sektor informal. Kurangnya representasi perempuan sebagai pengusaha di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Tambunan (2009) mengidentifikasi hambatan seperti tingkat pendidikan yang rendah dan lebih sedikit kesempatan pelatihan bagi perempuan, tanggung jawab rumah tangga (terutama bagi perempuan pedesaan), kendala hukum, budaya atau agama, dan kurangnya akses ke kredit formal dan lembaga keuangan. Kurangnya waktu untuk menyelesaikan kegiatan yang menghasilkan pendapatan karena peran peduli atau tidak dibayar juga dapat membuat perempuan memiliki lebih sedikit peluang untuk mengembangkan mata pencaharian mereka sendiri dan dapat mengakibatkan kerentanan terhadap situasi yang tidak aman atau diskriminatif.

Menggunakan informasi dari Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) 2014 ditemukan bahwa seKanadar 45% pemilik bisnis manufaktur adalah perempuan. Akan tetapi, sifat bisnis pria dan wanita tampaknya berbeda secara dramatis. Bisnis wanita berskala lebih kecil dan lebih informal. Tabel 2 menunjukkan bahwa sementara 30% bisnis yang dimiliki oleh pria mempekerjakan pekerja bayaran (terutama pria), hanya 8% dari bisnis wanita yang melakukannya. Lebih jauh, bisnis pria telah diresmikan pada tingkat yang lebih cepat daripada wanita (peningkatan dari 17% bisnis pria yang mempekerjakan pekerja bayaran pada tahun 2009 menjadi 30% pada tahun 2014 dibandingkan dengan peningkatan dari 3% menjadi 8% untuk wanita selama periode yang sama). Sebaliknya, bisnis wanita terus didominasi oleh tenaga kerja wanita yang tidak dibayar. Delapan puluh empat persen bisnis wanita bergantung pada pekerja wanita yang tidak dibayar. Temuan ini konsisten dengan pengamatan bahwa banyak wanita yang menjadi pemilik bisnis di Indonesia melakukannya karena kebutuhan sebagai sarana menambah pendapatan rumah tangga ketika pendapatan suami tidak cukup, Tambunan (2014). Oleh karena itu, sering ada perbedaan dalam aspirasi laki-laki dan perempuan untuk bisnis mereka, dengan perempuan wiraswasta memiliki keinginan yang lebih rendah untuk memperluas dan / atau memformalkan bisnis mereka. (AIPEG, DFAT, & CDES, 2015)

Tabel 4.5: Jenis Karyawan Menurut Jenis Kelamin Pemilik

	Total		Pemilik Laki-laki		Pemilik Perempuan	
	2009	2014	2009	2014	2009	2014
Proporsi Laki-laki yang dibayar	8%	14%	14%	24%	1%	2%
Proporsi Perempuan yang dibayar	3%	6%	3%	6%	2%	6%
Proporsi Laki-laki yang tidak dibayar	35%	32%	57%	52%	9%	7%
Proporsi Perempuan yang tidak dibayar	54%	48%	26%	18%	88%	84%

Sumber: IMK 2009 and 2014, Perhitungan Report yang dilakukan oleh AIPEG, DFAT, & CDES

Bagi para wanita yang berusaha mengembangkan bisnis mereka, akses dan kontrol aset keuangan telah terbukti sangat terkait dengan kekuatan pengambilan keputusan wanita dalam rumah tangga (AusAid, 2012) Tidak seperti di banyak negara berkembang lainnya, kredit mikro di Indonesia belum secara khusus ditargetkan kepada perempuan. Meskipun perempuan dianggap sebagai pasar yang penting untuk keuangan mikro, penargetan perempuan tidak pernah menjadi ciri khas industri keuangan mikro Indonesia. Proporsi rata-rata klien perempuan yang dilayani oleh lembaga keuangan mikro utama tetap cukup konstan selama 20 tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan dalam akses perempuan terhadap kredit. Perkiraan dari unit Bank Rakyat

Indonesia menunjukkan bahwa 25% dari peminjam kredit mikro dan nasabah tabungan mikro adalah perempuan. Salah satu kendala utama untuk akses perempuan ke kredit adalah kurangnya jaminan (ADB, 2006).

Sebuah meta-analisis kualitatif yang dilakukan oleh Vong et al. (2013) menemukan bahwa ketimpangan dalam akses ke keuangan mikro mencerminkan perbedaan dalam pencapaian pendidikan dan norma budaya daripada karakteristik keuangan mikro itu sendiri. Meskipun sering dinyatakan bahwa perempuan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan laki-laki untuk menggunakan lembaga keuangan, atau bank formal, Dames (2012) juga menemukan bahwa pendidikan dan bukan gender yang merupakan penentu penting apakah orang Indonesia mengakses kredit. Kesenjangan gender dalam pendidikan sebagian besar telah ditutup tetapi kurangnya pendidikan dapat tetap menjadi penghalang untuk membiayai wanita yang lebih tua. Banyak penelitian mengaitkan partisipasi keuangan dengan pendidikan, tetapi juga lebih khusus dengan pendidikan keuangan. Dalam studi selanjutnya, Vong and Song (2015) mengutip survei yang menemukan hampir setengah dari perempuan Indonesia 'mengakui bahwa mereka sangat tidak berpengalaman dalam jasa keuangan dan kurangnya pemahaman mereka tentang produk keuangan menyebabkan kesulitan bagi mereka untuk merumuskan keputusan keuangan yang sehat'. Akses ke kredit tercatat lebih menjadi masalah bagi perempuan pedesaan dan khususnya terkait dengan hak kepemilikan properti dan, akibatnya, kemampuan untuk

menawarkan jaminan terhadap pinjaman. Biaya transaksi bank juga ditemukan untuk menjelaskan kesenjangan antara partisipasi keuangan perempuan dan laki-laki. Disarankan 'platform satu atap' untuk transaksi untuk mengurangi biaya peluang waktu seperti pengasuhan anak, transportasi, dan proses identifikasi akun', Vong dan Song (2015). (AusAid, 2012)

World-Bank mencatat bahwa mereka telah mengamati beberapa perbedaan signifikan dalam indikator terpilah gender yang terkait dengan inklusi keuangan, seperti tabungan informal dan memiliki rekening bank. World-Bank, menggunakan data dari dua survei tentang akses ke layanan keuangan, juga menemukan beberapa perbedaan gender yang signifikan dalam akses ke layanan keuangan. Tidak ada perbedaan gender yang signifikan dalam karakteristik peminjam atau lembaga yang mereka pilih untuk pinjam. Namun mereka menemukan perbedaan gender dalam alasan yang diberikan untuk memiliki rekening bank. Wanita lebih cenderung memiliki rekening bank untuk menabung untuk kebutuhan masa depan, sedangkan pria lebih mementingkan kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman formal. (World Bank, 2010)

Sebagian besar pengusaha perempuan di Indonesia menggunakan tabungan pribadi dan keluarga sebagai sumber modal paling umum, Asia Foundation (2013). Namun ini juga benar, meskipun sedikit kurang, laki-laki. Data IMK 2014 menunjukkan bahwa 88% wanita membiayai bisnis mereka dengan modal

sendiri dibandingkan dengan 82% pria. Tabel 4 menunjukkan bahwa untuk pemilik yang menggunakan sumber modal lain, 37% pria menggunakan pinjaman bank dibandingkan dengan hanya 12% wanita. Lebih jauh, jika wanita meminjam untuk bisnis mereka, jumlah yang dipinjam lebih kecil. Dari responden yang tidak menggunakan pinjaman bank sebagai sumber modal, 62% wanita melaporkan bahwa alasan utamanya adalah mereka tidak tertarik untuk meminjam (dibandingkan dengan 45% pria). (AusAid, 2012)

Analisis gender menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut dirugikan karena kurangnya akses ke berbagai peluang, upaya pengembangan keterampilan, dan sumber daya produktif yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Undang-undang yang diskriminatif, norma-norma budaya terkait dengan peran gender dalam perkawinan, serta tanggung jawab reproduktif dan pengasuhan yang tak dibayar juga berujung pada pembatasan terhadap partisipasi ekonomi perempuan. Kunci untuk mengatasi kesenjangan ini adalah analisis gender yang mengidentifikasi berbagai strategi mitigasi spesifik, kesadaran umum mengenai permasalahan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan yang menghasilkan kapasitas dan pengambilan keputusan yang lebih mantap serta peningkatan peluang. (TPSA, 2016)

2. Rejim Internasional

Rezim yang paling komprehensif menyamakan dengan perilaku yang

terpola. Donald Puchala dan Raymond Hopkins berpendapat bahwa "sebuah rezim ada di setiap area isu substantif dalam hubungan antar negara ... Di mana pun ada keteraturan dalam perilaku, beberapa jenis prinsip, norma, atau aturan harus ada untuk menjelaskannya." "Tetapi keberadaan perilaku yang terpola saja seharusnya tidak membuat orang curiga bahwa suatu rezim bersembunyi di bawah permukaan. Definisi yang luas mengandung risiko mengacaukan pola perilaku yang diatur dengan aturan, dan hampir pasti melebih-lebihkan tingkat konsensus normatif dalam politik internasional. Membebaskan rezim dari perilaku bermotif membuat sulit untuk memutuskan bagaimana mereka memediasi, membatasi, atau memengaruhi perilaku. Istilah "rezim" kadang-kadang digunakan dengan cara deskriptif murni untuk mengelompokkan berbagai perilaku negara dalam bidang isu tertentu, tetapi karena potensi tautologi tinggi, pendekatan ini sebagian besar telah ditinggalkan. (Haggard & Simmons, *Theories of international regimes*, 1987)

Definisi Stephen Krasner yang berpengaruh mencari jalan tengah antara "ketertiban" dan komitmen eksplisit; itu menekankan dimensi normatif dari politik internasional. Krasner mendefinisikan rezim sebagai "prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit di mana harapan para pelaku bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu." Terlepas dari kehati-hatian yang menentukan hierarki komponen yang rumit ini, "prinsip" (yang tidak hanya mencakup keyakinan fakta dan sebab-akibat, tetapi juga "kejujuran")

menaungi norma-norma, "standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan kepatuhan" ." Norma, pada gilirannya, sulit dibedakan dari aturan, "keputusan khusus atau larangan untuk tindakan. (Haggard & Simmons, *Theories of international regimes*, 1987)

Rejim gender internasional menetapkan indikator tercapainya kesetaraan gender dengan mengukur capaian pada aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan keluarga, politik dan ekonomi. Beberapa pendekatan dan strategi telah dirumuskan guna mencapai kesetaraan gender, diantaranya perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*), perempuan dan pembangunan (*women and development*) serta gender dan pembangunan (*gender and development*). Pendekatan tersebut disempurnakan dalam pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang disepakati pada Konferensi Perempuan se Dunia di Beijing tahun 1995.

Secara politis, pengarusutamaan gender dicapai melalui Konferensi Internasional Perempuan di Beijing tahun 1995 sebagai bagian dari Landasan Aksi (*Platform of Action*). Adopsi politis pengarusutamaan gender mengokohkan kesetaraan gender sebagai rejim internasional setelah pembentukan Komisi Status Perempuan (*the Commisison on the Status of Women*) yang diprakarsai oleh seluruh negara anggota PBB. (Dzuhayatin, 2012)

Komitmen mengenai rejim internasional yang telah disepakati oleh Kanada membentuk

dasar untuk pekerjaan Global Affairs Canada dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di negara-negara mitra di seluruh dunia. Kanada memiliki reputasi internasional yang telah lama berdiri sebagai pemimpin dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan perlindungan hak-hak mereka. Kanada meratifikasi *UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* pada tahun 1981. Pada tahun 1995, setelah adopsi *Beijing Platform for Action*, Pemerintah Kanada berkomitmen untuk melakukan Analisis Berbasis Gender (sekarang disebut *Gender-Based Analysis+*) pada semua undang-undang, kebijakan, dan program masa depan. Pendekatan Global Affairs Canada terhadap kesetaraan gender didukung oleh Kebijakannya yang sudah lama tentang Kesetaraan Gender untuk pembangunan internasional konsisten dengan pendekatan GBA + (*gender-based analysis plus*) dan melampaui analisis hingga membutuhkan pencapaian hasil kesetaraan gender. Kanada mengambil peran kepemimpinan dalam upaya internasional untuk mengimplementasikan agenda *Women Peace and Security* (WPS). Pembangunan internasional Kanada dan bantuan kemanusiaan bekerja untuk mengimplementasikan UNSCR 1325 dan resolusi-resolusi berikutnya tentang WPS dengan memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di negara-negara yang rentan dan terkena dampak konflik. Kanada memainkan peran penting dalam mengadvokasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan sebagai tujuan yang berdiri sendiri

dalam Agenda 2030 untuk *Sustainable Development* dan terus bekerja dengan mitra yang berpikiran sama untuk secara efektif mencapai tujuan dan target kesetaraan gender.

Kanada telah berupaya menjadikan hak asasi perempuan sebagai fokus kuat *United Nations Commission on the Status of Women and Human Rights Council*. Kanada adalah salah satu negara pertama yang meratifikasi CEDAW, yang menetapkan standar internasional untuk menghapus diskriminasi gender. Pada tahun 2002, Kanada meratifikasi *Canada ratified the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, yang diadopsi oleh UN General Assembly pada tahun 2000. (Canada, 2017)

CEDAW berfungsi sebagai pedoman hukum terkuat tentang kesetaraan gender dan persyaratan untuk memastikan non-diskriminasi. CEDAW meletakkan kerangka kerja untuk kesetaraan substantif, melampaui kesetaraan formal dalam hukum, dan berfokus pada kesetaraan yang nyata dan hidup. Selanjutnya, itu adalah konvensi hak asasi manusia pertama dan satu-satunya yang mewajibkan Negara Pihak untuk memodifikasi dan menghapuskan sikap sosial dan pola dan praktik budaya yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas dari kedua jenis kelamin. Ini secara eksplisit menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya oleh agen negara, tetapi juga oleh individu, organisasi dan perusahaan swasta. Ini mengintegrasikan hak-hak sipil perempuan dan

hak politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya di bawah kerangka normatif non-diskriminasi dan kesetaraan. Konvensi ini juga mencakup jaminan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan di ruang pribadi keluarga. Konvensi ini juga memungkinkan penerapan langkah-langkah khusus sementara untuk koreksi praktik diskriminasi. Sebagai bagian dari komitmen Kanada terhadap konvensi ini, Kanada harus menyerahkan laporan kepada PBB setiap empat tahun tentang bagaimana Kanada bekerja untuk memajukan hak-hak perempuan.

Kesetaraan gender adalah hak. Memenuhi hak ini adalah kesempatan terbaik yang dimiliki dalam menghadapi beberapa tantangan paling mendesak di saat ini — dari krisis ekonomi dan kurangnya perawatan kesehatan, perubahan iklim, kekerasan terhadap perempuan dan meningkatnya konflik. Perempuan tidak hanya lebih dipengaruhi oleh masalah-masalah ini, tetapi juga memiliki ide dan kepemimpinan untuk menyelesaikannya. Diskriminasi gender masih menahan terlalu banyak wanita, juga menahan dunia saat ini.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan 17 *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang diadopsi oleh para pemimpin dunia termasuk Kanada dan Indonesia pada tahun 2015, mewujudkan peta jalan untuk kemajuan yang berkelanjutan dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari masing-masing dari 17 tujuan.

Hanya dengan memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan di semua tujuan yang akan didapatkan untuk keadilan dan inklusi, ekonomi yang bekerja untuk semua, dan mempertahankan lingkungan kita bersama sekarang dan untuk generasi mendatang. (UN WOMEN)

Agenda 2030 untuk *Sustainable Development Goals (SDGs)* diadopsi oleh 193 negara anggota PBB pada September 2015. Agenda 2030 adalah kerangka kerja aksi global untuk manusia, planet, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan. Agenda universal ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Sasaran 5 adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Itulah sebabnya Agenda 2030 bersifat universal, berlaku untuk semua negara dan aktor. Ini mengharuskan semua negara untuk mengambil tindakan iklim, mengurangi pengangguran, memperkuat kesetaraan gender dan mempromosikan masyarakat yang damai, untuk menyebutkan beberapa, jika dunia ingin memberantas kemiskinan dan beralih ke pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Menyadari sifat SDGs yang saling terkait dan keterkaitan antara tindakan Kanada dan kemajuan di tingkat lokal, nasional, regional, dan global, koherensi kebijakan akan mendukung pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menangani tantangan pembangunan berkelanjutan. Mencapai agenda ini membutuhkan upaya seluruh Kanada. Dengan mengadopsi Agenda 2030, Kanada telah

berkomitmen untuk bekerja dengan mitra nasional dan internasionalnya untuk membangun dunia yang lebih damai, inklusif, dan makmur yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Di seluruh negeri dan di seluruh dunia, orang Kanada sudah menjawab panggilan itu. Dari bisnis yang bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan, hingga organisasi yang membuat kemajuan dengan kesetaraan gender, masyarakat memberikan layanan kepada mereka yang paling rentan dan individu yang memilih produk yang lebih bersumber secara lokal dan berkelanjutan — setiap orang memiliki peran untuk dimainkan dan dapat berkontribusi untuk menggerakkan 2030 Agenda maju. (Canada, 2019)

Komitmen ini membentuk dasar untuk pekerjaan GAC dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di negara-negara mitra di seluruh dunia. Kanada memiliki reputasi internasional yang telah lama berdiri sebagai pemimpin dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan perlindungan hak-hak mereka. Kanada meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1981. Pada tahun 1995, setelah adopsi Platform Aksi Beijing, Pemerintah Kanada berkomitmen untuk melakukan Analisis Berbasis Gender (sekarang disebut Analisis Berbasis Gender +) pada semua undang-undang, kebijakan, dan program masa depan. Pendekatan GAC terhadap kesetaraan gender didukung oleh Kebijakannya yang sudah lama tentang Kesetaraan Gender untuk pembangunan

internasional konsisten dengan pendekatan GBA + dan melampaui analisis hingga membutuhkan pencapaian hasil kesetaraan gender. Kanada mengambil peran kepemimpinan dalam upaya internasional untuk mengimplementasikan agenda Perdamaian dan Keamanan Perempuan (WPS). Pembangunan internasional Kanada dan bantuan kemanusiaan bekerja untuk mengimplementasikan UNSCR 1325 dan resolusi-resolusi berikutnya tentang WPS dengan memajukan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di negara-negara yang rentan dan terkena dampak konflik. Kanada memainkan peran penting dalam mengadvokasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan sebagai tujuan yang berdiri sendiri dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan terus bekerja dengan mitra yang berpikiran sama untuk secara efektif mencapai tujuan dan target kesetaraan gender.

Kanada telah berupaya menjadikan hak asasi perempuan sebagai fokus kuat *United Nations Commission on the Status of Women and Human Rights Council*. Kanada adalah salah satu negara pertama yang meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, yang menetapkan standar internasional untuk menghapus diskriminasi gender. Pada tahun 2002, Kanada meratifikasi *Canada ratified the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, yang diadopsi oleh UN General Assembly pada tahun 2000. (Canada, 2017)

Sebagai bagian dari komitmen Kanada terhadap konvensi ini, Kanada harus menyerahkan laporan kepada PBB setiap empat tahun tentang bagaimana Kanada bekerja untuk memajukan hak-hak perempuan.

Kesetaraan gender adalah hak. Memenuhi hak ini adalah kesempatan terbaik yang dimiliki dalam menghadapi beberapa tantangan paling mendesak di saat ini — dari krisis ekonomi dan kurangnya perawatan kesehatan, perubahan iklim, kekerasan terhadap perempuan dan meningkatnya konflik. Perempuan tidak hanya lebih dipengaruhi oleh masalah-masalah ini, tetapi juga memiliki ide dan kepemimpinan untuk menyelesaikannya. Diskriminasi gender masih menahan terlalu banyak wanita, juga menahan dunia saat ini.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan *17 Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diadopsi oleh para pemimpin dunia termasuk Kanada dan Indonesia pada tahun 2015, mewujudkan peta jalan untuk kemajuan yang berkelanjutan dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari masing-masing dari 17 tujuan. Hanya dengan memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan di semua tujuan yang akan didapatkan untuk keadilan dan inklusi, ekonomi yang bekerja untuk semua, dan mempertahankan lingkungan Kanada bersama sekarang dan untuk generasi mendatang.

